

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NASABAH DENGAN
PT. BPR ARTHA MORO SRAGEN DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT BAGI USAHA PERDAGANGAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DEVI RAHMAWATI

C 100 150 123

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NASABAH DENGAN PT. BPR
ARTHA MORO SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT BAGI USAHA PERDAGANGAN**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DEVI RAHMAWATI
C 100 150 123

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Nuswardhani, SH., SU
NIDN. 0606065702

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NASABAH DENGAN PT. BPR
ARTHA MORO SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT BAGI USAHA PERDAGANGAN

Oleh :

DEVI RAHMAWATI

C 100 150 123

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 28 Juni 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Nuswardhani, S.H., S.U
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan spanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Juni 2019

Penulis



DEVI RAHMAWATI
C 100 150 123

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NASABAH DENGAN PT. BPR ARTHA MORO SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI USAHA PERDAGANGAN

Abstrak

Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai integritas dalam kehidupan perekonomian sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui perantara perkreditan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit, peraturan serta hak dan kewajiban antara Bank dengan nasabah, serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena usaha untuk mendekatkan masalah yang diteliti dalam perjanjian kredit berupa aspek hukum dan asas-asas hukum. Hasil penelitian dilakukan sebelum terjadinya kesepakatan, saat terjadinya kesepakatan antara Bank dengan nasabah, dan hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan terjadi. Setelah perjanjian terjadi nantinya menimbulkan hubungan hukum yang mengakibatkan para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka harus bertanggung jawab sesuai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

Kata Kunci: perjanjian kredit, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

Abstract

Banking institutions are one of the financial institutions that have integrity values in economic life as intermediaries for parties that have surplus funds (*surplus of funds*) with those who lack and need funds (*lack of funds*). The bank functions to collect funds from the community directly and channel them back to the community through credit brokers. In this study aims to determine the process of implementing credit agreements, regulations and rights and obligations between the Bank and customers, as well as legal responsibility if one party makes a mistake on the basis of default and unlawful conduct. The method used in this study is a normative method, because of the effort to bring the problems examined in the credit agreement in the form of legal aspects and legal principles. The results of the research are carried out prior to the agreement, when an agreement between the Bank and the customer occurs, and legal relations arising from the agreement occur. After the agreement occurs, it will lead to a legal relationship that results in the parties having to exercise their rights and obligations. If one party makes a mistake or violates an agreed agreement, it must be responsible according to the terms of the agreement.

Keywords: credit agreement, legal relations, legal responsibility

1. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai integritas dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dalam kesehariannya bank berinteraksi dengan para pengguna jasa bank atau yang lebih lazim disebut dengan nasabah, dan melalui kegiatan itu akan timbul hubungan hukum antara pihak bank sebagai penyedia jasa dan nasabah sebagai pengguna dan/atau konsumen.

Pengertian kredit berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merupakan kredit adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Djumhana, 2010).

Kredit yang telah diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dalam pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Dalam hal ini kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Sebelum melakukan perjanjian, nasabah yang mendapat kepercayaan dari Bank dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti formulir, fotokopi KTP, KK, buku nikah, fotokopi agunan, dan nantinya ada kesepakatan antara para pihak yaitu nasabah dan pihak Bank.

Setelah terjadi perjanjian timbullah hubungan hukum antara para pihak Bank dan nasabah untuk melakukan hak dan kewajiban, dimana apabila salah satu pihak melanggar kewajiban atau tidak dipenuhi maka ia yang harus bertanggung jawab berdasarkan hukum dengan mengganti segala kerugian.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT BPR Artho Moro Sragen, untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban antara nasabah dengan PT BPR Artho Moro Sragen, dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila antara

nasabah dengan PT BPR Artha Moro Sragen melakukan perbuatan melawan hukum.

2. METODE

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode normatif. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT BPR Artha Moro Sragen. Dalam penelitian ini menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan caraa pengumpulan data secara studi kepustakaan, studi lapangan dilakukan dengan wawancara dengan pihak Bank.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bagi Usaha Perdagangan antara Nasabah dengan PT. BPR Artha Moro

Proses pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT BPR Artha Moro Sragen, yang sebelumnya calon nasabah harus mengajukan permohonan kredit terlebih dulu kepada pihak Bank nantinya pihak Bank akan menentukan apakah permohonan kredit tersebut akan diterima oleh pihak Bank atau tidak. Kemudian apabila pihak Bank menyetujui permohonan kredit dari nasabah, nasabah harus emenuhi persyaatan baik persyaata administrasi maupun persyaratan hukum.

Persyaratan administrasi disini adalah perjanjian yang menggunakan perjanjian baku dengan semua ketentuan-ketentuan Bank, seperti formulir, peraturan, tata tertib, hak dan kewajiban, serta semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bank, dimana nasabah tidak boleh ikut campur dalam pembuatan perjanjian baku tersebut, karena perjanjian tersebut telah dibuat lebih dahulu oleh pihak Bank sebelum nasabah mengajukan perjanjian kredit. Kemudian nasabah hanya membaca dan memahami ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Bank. Dan nasabah hanya diberikan pilihan apabila menyetujui semua syarat dan ketentuan tersebut maka nasabah harus menandatangani sebagai tanda kesepakatan, serta apabila nasabah tidak menerima isi yang terdapat dalam formulir tersebut maka tidak akan terjadi suatu perjanjian kredit.

Persyaratan hukum dalam perjanjian kredit ini berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : a). Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri,

Dimana antara debitur dan kreditur saling mengikatkan diri satu sama lain dengan adanya suatu kesepakatan yang ditandatangani tanpa adanya paksaan sehingga oleh kedua belah pihak sehingga menimbulkan suatu perikatan ; b). Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, disini cakap terhadap orang yang telah dewasa minimal 21 tahun, berakal sehat; c). Suatu hal tertentu, perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa apa yang diperjanjikan yaitu perjanjian kredit, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kredit disini berupa fasilitas kredit agunan SHM tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan; d). Suatu sebab yang halal, dimaksud dalam perjanjian ini tidak ada yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Setelah semua persyaratan terpenuhi baik administrasi maupun secara hukum, pihak Bank akan menganalisa dan mensurvey kelapangan terhadap calon nasabahnya dengan unsur 5'C yakni: *Character* (Watak); *Capacity* (Kemampuan); *Capital* (Modal); *Collateral* (Jaminan); *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian). Kemudian jika pihak Bank telah menganalisis dan menyetujui permohonan kredit dari calon nasabah, maka nasabah dan pihak Bank harus menandatangani suatu perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Saat terjadi kesepakatan antara pihak Bank dengan nasabah dalam tahap ini pihak bank akan memberikan formulir yang harus diisi oleh pihak debitur, formulir tersebut berisi data-data calon debitur dan terdapat Fasilitas kredit yang akan diberikan pihak Bank dengan jumlah yang akan dipinjam oleh nasabah termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan.

Setelah terjadinya kesepakatan maka timbullah hubungan hukum yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Bank hanya berkewajiban menyediakan kredit untuk debitur dan debitur berhak mempergunakan kredit yang diperolehnya dari bank untuk tujuan kredit dengan jangka waktu ditentukan, dan debitur wajib melunasi seluruh kreditnya termasuk bunga, denda/bunga tunggakan serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank kepada debitur selambat-lambatnya sampai tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

3.2 Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara Nasabah dengan PT BPR Artha Moro

Peraturan serta hak dan kewajiban antara nasabah dengan pihak Bank. Perjanjian disini harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal. Kemudian dalam melakukan perjanjian harus adanya kesepakatan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara, dimana kesepakatan terjadi para pihak telah menandatangani perjanjian kredit yang berisi fasilitas kredit yang dibuat oleh pihak Bank sehingga dalam perjanjian kredit ini disebut perjanjian baku. Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak maka timbul hubungan hukum yang mengikat yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara . dan dalam hubungan hukum tersebut timbullah hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Nomor: dalam Perjanjian Kredit Nomor : 123.02589-3/AM/VI/20 yang berisikan fasilitas kredit, jangka waktu kredit, bunga, provisi dan biaya, pembebanan biaya, pembayaran angsuran pinjaman, hak dan kewajiban para pihak, denda keterlambatan, pengalihan hak agunan, keadaan ingkar janji, agunan kredit, addendum, dan domisili hukum yang berlaku.

Kewajiban bank yaitu memberikan fasilitas kredit terhadap nasabah sesuai yang telah disepakati. Sedangkan kewajiban nasabah adalah membayar dan melunasi angsuran pinjaman pokok serta bunga dan biaya lainnya yang dibebankan kepada pihak Bank setiap bulan termasuk apabila adanya denda keterlambatan selambat-lambatnya sampai berakhirnya tanggal perjanjian itu. Apabila kewajiban itu dilanggar maka harus bertanggung jawab atas dasar kesalahan/kelalaian baik itu wanprestasi yang terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara maupun perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

3.3 Tanggung jawab hukum antara Nasabah dengan PT BPR Artha Moro melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum

Tanggung jawab hukum akan muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan / kelalaian, dalam hal ini biasanya nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan apa yang telah disepakati nantinya pihak Bank akan

mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali kepada nasabah. Apabila nasabah telah melakukan wanprestasi, karena terlambat dalam memenuhi prestasinya yang dilakukan dengan sengaja dan tidak melaksanakan perjanjian yang sebagaimana telah diperjanjikan sudah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, dan apabila perbuatan melawan hukum dilakukan pihak Bank dengan menaikkan bunga secara mendadak, maka akan memberatkan pihak debitur, nantinya pihak debitur dapat menuntut pihak Bank di Pengadilan.

Namun apabila adanya Surat Peringatan tersebut, nasabah masih mempunyai itikad baik dengan melakukan kewajibannya untuk terus mengangsur setiap bulannya maka nasabah telah melakukan prestasinya lagi kepada pihak Bank PT BPR Artha Moro.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebelum terjadinya perjanjian nasabah harus mengajukan permohonan kredit terhadap pihak Bank terlebih dulu, dimana nasabah harus memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan hukum.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain : 1) Identitas dan kelengkapan data nasabah seperti, fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy surat nikah, fotocopy jaminan (SHM & SPP PBB/BPKB & STNK), dan daftar slip gaji terakhir; 2) Nasabah harus mengisi formulir yang diberikan oleh pihak Bank dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat pihak Bank. Formulir tersebut berisi peraturan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi nasabah. Apabila nasabah menyetujui semua ketentuan yang ada didalam formulir tersebut dan nasabah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka nasabah dapat mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank, dan apabila nasabah tidak menyetujui ketentuan tersebut maka tidak akan terjadi suatu perjanjian kredit; 3) Nasabah harus menyerahkan jaminan terhadap pihak Bank.

Kemudian persyaratan hukum yang dimaksud disini sesuai berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri; b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal.

Setelah 2 syarat tersebut terpenuhi, kemudian para pihak melakukan perjanjian kredit. Perjanjian kredit terjadi karena kesepakatan antara para pihak yang ditandai dengan penandatanganan dalam akta perjanjian tersebut dengan penandatanganan berarti para pihak telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akta perjanjian kredit.

Kemudian setelah terjadinya kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata para pihak antara nasabah dan pihak Bank maka akan terjadinya hubungan hukum dalam perjanjian kredit yang telah mengikat para pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Kewajiban pihak Bank merupakan hak nasabah dan hak nasabah merupakan kewajiban dari pihak Bank atau sebaliknya, maka disini para pihak harus memenuhi kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut berdasarkan peraturan Pasal 1320 KUPerdata, yang dimana nantinya pemenuhan tersebut terdapat dalam Perjanjian Kredit No : 123.02589-3/AM/VI/2018. Dimana nasabah juga harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Bank dan ketentuan lain seperti yang diatur dalam KUHPerdata.

Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian dengan sengaja, yaitu tidak memenuhi kewajiban seperti yg telah diperjanjikan maka pihak yang melanggar perjanjian dinyatakan wanprestasi ya berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, dimana ia harus bertanggung jawab mengganti kerugian, dan jika salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan proses perjanjian kredit maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ia harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dalam melakukan perbuatan melawan hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

4.2.1 Bagi Nasabah

Bagi nasabah sebelum melakukan perjanjian kredit dengan Bank sebaiknya harus meminta penjelasan terlebih dulu tentang ketentuan dan penyelesaian dari perjanjian tersebut. Yang dimana perjanjian kredit tersebut telah dibuat oleh pihak Bank tanpa adanya ikut campur nasabah. Jadi, disini pihak Bank telah menyediakan kredit dan membuat perjanjian

untuk nasabah. Apabila perjanjian kredit tersebut telah disetujui oleh nasabah maka nasabah harus melunasi sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani, sehingga tidak akan terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang akan merugikan pihak nasabah sendiri serta pihak Bank.

4.2.2 Bagi Pihak Bank

Bagi pihak bank disini harus memperhatikan benar-benar calon nasabahnya, dengan kehati-hatian dalam merealisasikan pengajuan permohonan kredit yang diajukan nasabah. Dengan melihat prinsip-prinsip 5'C yaitu : Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of Economy. Serta dalam melaksanakan perjanjian kredit ini diharapkan pihak Bank juga tegas terhadap perjanjian yang telah disepakati, supaya terhindar dari nasabah yang akan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum.

4.2.3 Bagi Masyarakat Umum

Terhadap masyarakat diharapkan lebih bijaksana dalam memilih Bank apabila akan melaksanakan perjanjian kredit. Karena sebelum melibatkan diri dalam perjanjian kredit sebagai calon nasabah harus bisa menilai kemampuan diri sendiri apakah mampu untuk membayar angsurannya atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng Naja, H.R. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Dimiyati, Khuzdalifah dan Kelik wardiono. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djumhana, Muhammad. (2006). *Hukum Perbankan diIndonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Hardijan, Rusli. (1996). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cetakan Kedua. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- R. Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenam. Jakarta : Intermasa.
- Sutrisno, Hadi. (1997). *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UGM press.
- Syofian, Siregar. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.